

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata evaluasi adalah penilaian. Evaluasi adalah proses mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkannya terhadap standar yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana target telah tercapai dan apa saja yang perlu diperbaiki, melalui evaluasi, kita bisa menilai efektivitas suatu kegiatan dan mengidentifikasi dampak positif yang dihasilkan (Umar, 2005). Setiap program atau kebijakan, sekecil atau sebesar apapun, perlu dievaluasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Evaluasi program adalah proses penerapan berbagai model, teknik, dan pengetahuan evaluasi secara sistematis untuk menilai dan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, serta efektivitas suatu program (Langbein & Felbinger, 2006, dalam Tayibnapis, 2008). Kegiatan ini memanfaatkan metode ilmiah guna mengukur pelaksanaan dan hasil dari sebuah program dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan (Rutman, dalam Tayibnapis, 2000).

Setiap program perlu diakhiri dengan evaluasi untuk memastikan apakah program tersebut telah memenuhi tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi program meliputi tiga tahap utama, yaitu: 1) merumuskan pertanyaan dan menentukan informasi yang diperlukan, 2) mengumpulkan data yang relevan

dengan penelitian, dan 3) menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan untuk menentukan apakah program akan dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan (Issac dan Michael dalam Tayibnapis, 2008). Dalam konteks evaluasi ini, salah satu aspek yang penting, strategis, dan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik, khususnya di Indonesia, adalah pengelolaan permukiman kumuh (slum settlement management), terutama di wilayah perkotaan (Muhammad, 2023).

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Keberadaan kawasan permukiman kumuh dapat memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan perkembangan sebuah kota. Kualitas lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya cenderung menurun akibat adanya permukiman kumuh sehingga akan berpengaruh negatif terhadap citra kota tersebut. Dampak dari permukiman kumuh juga berkaitan dengan adanya perencanaan dan pembangunan kota di masa depan. Lingkungan atau kawasan permukiman kumuh tidak selalu berada di pinggiran kota, namun bisa juga berada dekat dengan pusat kota.

Menurut perkiraan PBB pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di kota-kota besar seperti : Kinshasa, Delhi, dan Dhaka akan mengalami penambahan penduduk lebih dari 700.000 jiwa setiap tahunnya hingga tahun 2030 (Mahabir., et al 2016).

Pertumbuhan penduduk dunia yang sangat cepat terutama di kawasan Asia dan Afrika, akan semakin meningkatkan jumlah penduduk di kota-kota besar. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar di Asia juga akan ikut merasakan dampak dari pertumbuhan penduduk ini dengan jumlah penduduk yang mencapai 278,11 juta jiwa pada tahun 2023. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ketiga di Asia setelah India jumlah 1,43 miliar jiwa dan Tiongkok dengan jumlah 1,42 miliar jiwa. Indonesia juga menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di kota-kota besar. Hal ini sejalan dengan prediksi PBB yang menyebutkan bahwa sebagian besar pertumbuhan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kota-kota di Asia dan Afrika. Indonesia menyumbang sekitar 5,85% terhadap total penduduk Asia (databoks, 2023/10/23)

Permasalahan kawasan kumuh merupakan fenomena umum di kota-kota besar dunia, termasuk di Kota Semarang, Indonesia. Pertumbuhan kota yang pesat dan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seringkali menjadi penyebab utama munculnya kawasan kumuh, jika tidak segera ditangani maka keberadaan kawasan kumuh dapat memicu berbagai masalah sosial lainnya. Pada saat mengatasi permasalahan permukiman kumuh memerlukan perencanaan perkotaan sehingga dapat melibatkan kebijakan secara menyeluruh untuk mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan yang efektif harus mencakup perhatian terhadap kebutuhan penduduk, penggunaan lahan yang optimal, serta pelestarian lingkungan alam dan budaya. Selain perencanaan dan kebijakan, partisipasi

aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program permukiman kumuh juga sangat penting. (Saputra dkk, 2024)

Mengutip dari Kompas (2024/05/25) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mencatat, terdapat 4.170 hektar permukiman kumuh di seluruh Indonesia yang harus ditata dan ditangani. Indikator perumahan dan Kesehatan Lingkungan pada tahun 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistika (BPS) terdapat empat komponen standar kelayakan yang dinilai yaitu : ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses kepemilikan terhadap layanan sumber air minum, dan akses sanitasi layak

Hasil laporan dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kompas.com (2024/05/25) menunjukkan terdapat 7,94% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah kumuh pada tahun 2023 yang artinya bahwa 8 dari 100 rumah tangga di Tanah Air yang tinggal di rumah kumuh sepanjang tahun 2023. BPS mengkategorikan sebagai rumah kumuh jika sebuah hunian tidak memenuhi komponen ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, serta kepemilikan akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang layak.

Mengutip databoks (2024/03/13) Papua menjadi Provinsi dengan persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh terbanyak secara nasional, yakni mencapai 37,98% pada 2023. Meskipun begitu, angkanya turun cukup signifikan dari proporsi pada 2022 yang menyentuh 41,54%. Sementara, provinsi dengan proporsi rumah tangga yang tinggal di rumah kumuh terendah adalah D.I Yogyakarta, yaitu hanya 1,85% sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data semarangkotago.id persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha di kota Semarang yang ditangani yakni

pada tahun 2021 mencapai 43,52% sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 92,96%

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah tipe permukiman yang dinilai tidak layak huni akibat ada kondisi ketidakteraturan bangunan, tingginya derajat kepadatan bangunan, serta kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kondisi kumuh yaitu upaya meningkatkan derajat kualitas perumahan serta permukiman kumuh guna mempertinggi mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Program KOTAKU telah mengurangi area kumuh di beberapa daerah prioritas penanganan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, program penanganan ini hanya berfokus pada penanganan fisik dan belum ada inovasi penanganan yang berkelanjutan. Hal ini tidak sesuai dengan target ke-11 SDG yaitu "Pada tahun 2030, memastikan akses bagi semua orang ke perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta layanan dasar dan meningkatkan kawasan kumuh" (UN-Habitat, 2016 dalam Alamsyah dkk, 2021).

Program kotakku secara umum bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan dasar di permukiman kumuh perkotaan yang layak

huni, produktif dan berkelanjutan. Terdapat dua maksud tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a) Memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan, seperti jalan lingkungan, air minum, sistem drainase dan pengelolaan limbah
- b) Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan meningkatkan akses untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang produktif, layak huni dan berkelanjutan (Rubianti, Wahyuningrat, dalam Rubianti dkk, 2022). “Gerakan 100-0-100” dengan penjelasan 100 persen tersedianya penyediaan air minum, 0 persen bebas dari kekumuhan, dan 100 persen tersedianya akses sanitasi yang layak dan memadai (Vojana et al., 2021). Pelaksanaan Program KOTAKU dilakukan dengan 5 Tahap, yaitu: 1. Tahap Pendataan 2. Tahap Perencanaan 3. Tahap Pelaksanaan 4. Tahap pemantauan dan evaluasi 5. Tahap berkelanjutan. Program Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan di 34 provinsi, sebanyak 269 Kota/Kabupaten dengan total luasan kumuh seluas 38.431 Hektare (Harjo et al., 2021).

Tabel 1.1
Kawasan Kumuh Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK KUMUH	LUAS KUMUH (Ha)		JUMLAH LOKASI/ KAWASAN KUMUH	
			AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
1	KOTA SEMARANG	SK Nomor 050/275 Tahun 2021	304.259	158.661	33	16
2	SUKOHARJO	SK BUPATI NOMOR 653/412 TAHUN 2023	376.539	364.829	83	79
3	REMBANG		335.02	239.22	29	22
4	PEKALONGAN	SK Bupati Pekalongan No 667/450 Tahun 2021	270.116	266.894	19	19
5	PEMALANG	188.4/285/tahun 2022	303	215.65	22	17
6	KEBUMEN		271.12	271.12	37	37
7	PURBALINGGA	640/212/2021	167.28	157.65	13	12
8	PATI		170.83	117.78	20	10
9	KLATEN	SK BUPATI KLATEN NOMOR 600/35 TAHUN 2023	115.46	89.55	10	7
10	PURWOREJO	160.18/526/2020	111.646	6.059	6	2
11	BANYUMAS	660/1094/Tahun 2020	76.89	50.17	20	12
12	KOTA TEGAL	648/048.1/2022	98.78	67.48	4	2
13	BATANG	Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/422/2023	88.5	67.32	12	6
14	KUDUS	563/211/2023	84.051	47.383	9	4
15	WONOGIRI	SK Kumuh No 653/381/HK/2022	28.83	27.05	3	2
16	KOTA MAGELANG		29.356	29.356	6	6
17	KOTA PEKALONGAN	SK Nomor 430/1131 Tahun 2020	45.96	45.96	5	5
18	JEPARA		0	0	0	0
19	TEGAL	050/1332	21.42	21.42	1	1
20	BOYOLALI	663/773 Tahun 2020	16.03	16.03	1	1
21	SRAGEN	900/163/01.3/2022	11.573	5.123	2	1
22	KARANGANYAR		10.3	10.3	0	0
23	KOTA SURAKARTA	No. 640/69.9 Tahun 2020	6.58	4.83	1	0
24	GROBOGAN		0	0		
25	CILACAP		0	0		
26	KENDAL		0	0		
27	BLORA		0	0		
28	BANJARNEGARA		0	0	0	0
29	BREBES		0	0	0	0
30	WONOSOBO		0	0		
31	MAGELANG		0	0		
32	KOTA SALATIGA		0	0		
33	DEMAK		0	0		
34	SEMARANG	SK Nomor 1 Tahun 2011	0	0		

NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK KUMUH	LUAS KUMUH (Ha)		JUMLAH LOKASI/ KAWASAN KUMUH	
			AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
35	TEMANGGUNG		0	0		

Sumber : <https://sikaper.disperakim.jatengprov.go.id/kawasan/kabupaten>, diakses pada

bulan Agustus 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 kawasan kumuh pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain, Kota Semarang berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Sukoharjo, luas kumuh awal 304.259 Ha turun menjadi 158.661 Ha dengan Jumlah Lokasi / Kawasan Kumuh 33 menjadi 16 lokasi yang meliputi 5 kecamatan, yaitu : Tugu, Tembalang, Semarang Tengah, Genuk, dan Gunung Pati. Menurut SK Walikota Semarang Nomor 050/275/2021 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang sebagai acuan dalam pelaksanaan Program KOTAKU dengan Kecamatan Genuk menjadi wilayah prioritas pengelolaan wilayah banjir. Hal tersebut mengingat bahwa pada Tahun 2023 dan 2024 banjir yang terjadi di Kecamatan Genuk cukup tinggi.

Menurut radarsemarang.jawapos.com (2024/03/15) wilayah Kecamatan Genuk masih mengalami banjir yang cukup parah. Menurut Camat Genuk semua kelurahan atau 13 kelurahan di Wilayah Kecamatan Genuk sempat terdampak banjir, terdapat tujuh kelurahan masih terdampak parah yaitu : Muktiharjo Lor, Terboyo Wetan, Trimulyo, Genuksari, Gebangsari, Kudu dan Banjardowo.

Dikutip dari detik.com (2024/12/01) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyampaikan bahwa telah menyiapkan detail engineering design

(DED) terkait penanganan banjir rob di kawasan Genuk dan Kaligawe, Kota Semarang. DED tersebut telah disiapkan karena nantinya akan menjadi penanganan jangka panjang antisipasi banjir rob yang terjadi berulang-ulang ketika hujan lebat melanda.

Berdasarkan Peraturan Walikota Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 terdapat skala prioritas dalam rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan permukiman kumuh dan salah satunya adalah Kawasan Banjardowo (Kecamatan Genuk). Berikut merupakan Kawasan kumuh di Kecamatan Genuk, yaitu :

Tabel 1.2
Kawasan Kumuh Paling Rendah
Di Kecamatan Genuk

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)
1	Bangetayu kulon	1,5
2	Bangetayu wetan	8,35
3	Karangroto	5,05
4	Kudu	6,4
5	Banjardowo	28,15

Sumber : Perwal No. 19 Tahun 2023, diakses pada bulan Agustus 2024

Data Kawasan kumuh yang paling rendah dan paling tinggi di Kecamatan Genuk, Kota Semarang yaitu :

Tabel 1.3
Kawasan Kumuh Paling Rendah
Di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)
1	Kelurahan Bangetayu Kulon RT 5 / RW VIII	0,64
2	Kelurahan Bangetayu Kulon RT 6 / RW VIII	0,86
TOTAL		1.50

Sumber : Perwal No. 19 Tahun 2023, diakses pada bulan Agustus 2024

Tabel 1.4
Kawasan Kumuh Paling Tinggi
Di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)
1	Kelurahan Banjardowo RT 1 / RW II	1,10
2	Kelurahan Banjardowo RT 1 / RW IV	2,40
3	Kelurahan Banjardowo RT 2 / RW II	1,84
4	Kelurahan Banjardowo RT 2 / RW IV	1,24
5	Kelurahan Banjardowo RT 3 / RW II	3,24
6	Kelurahan Banjardowo RT 3 / RW IV	2,28
7	Kelurahan Banjardowo RT 4 / RW II	2,10
8	Kelurahan Banjardowo RT 4 / RW IV	2,45
9	Kelurahan Banjardowo RT 5 / RW II	0,77
10	Kelurahan Banjardowo RT 6 / RW II	1,77
11	Kelurahan Banjardowo RT 6 / RW IV	1,00
12	Kelurahan Banjardowo RT 7 / RW II	2,32
13	Kelurahan Banjardowo RT 7 / RW IV	1,32
14	Kelurahan Banjardowo RT 8 / RW IV	0,78
15	Kelurahan Banjardowo RT 9 / RW IV	1,11
16	Kelurahan Banjardowo RT 5 / RW IV	2,43
TOTAL		28,15

Sumber : Perwal No. 19 Tahun 2023, diakses pada bulan Agustus 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 dan Tabel 1.3, Kawasan Kumuh di Kecamatan Genuk merupakan Kawasan penanganan kumuh Kota Semarang berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Tahun 2022-2026, dengan target Kota Semarang 0% atau zero kawasan kumuh.

Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh, dan selanjutnya dilakukan penetapan terhadap lokasi permukiman kumuh tersebut yang tertuang dalam SK Walikota/Bupati. Penanganan yang dilakukan

disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama pada pasal VII dan VIII yang menjelaskan tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan, yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

Penelitian terdahulu oleh Sitorus, dkk (2020) menyatakan bahwa di Kelurahan Tanjung Mas terdapat jalan setapak yang rusak seluas 4.958,93 m², dan jalan lingkungan yang rusak seluas 12.174 m², saluran drainase mengalami kerusakan dan menurunnya kapasitas yang disebabkan oleh sedimentasi, sampah, bangunan liar, dan rob, dan masih terdapat 116 KK yang menggunakan MCK bersama. Hasil penelitian tersebut menjadi contoh bahwa permukiman kumuh di Kota Semarang bercirikan jalan yang rusak, permasalahan saluran drainase dan sampah serta juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan MCK bersama.

Hasil penelitian yang dilakukan Kiswoyo, dkk pada tahun 2023 menunjukkan proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang dianalisis dari aspek *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust buildings* (membangun kepercayaan), dan *commitment to process* (komitmen untuk berproses) belum optimal, serta aspek *shared understanding* (berbagi pemahaman) dan *intermediate outcomes* (hasil sementara) sudah berjalan baik. Selain itu, juga ditemukan faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu faktor kepentingan pemerintah, struktur sosial, kultural/kebiasaan, dan bencana alam dengan demikian, penanganan kawasan kumuh tidak mudah dilakukan.

Masalah permukiman kumuh bukanlah persoalan baru melainkan sudah menjadi fenomena permasalahan klasik baik di tingkat global, regional maupun nasional dan lokal. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya. Akan tetapi, setelah program KOTAKU berakhir pada tahun 2023 perlu ada evaluasi mengenai dampak program setelah program tersebut berlangsung.

Evaluasi program KOTAKU dalam penelitian ini bermaksud untuk mengukur keberhasilan program KOTAKU dalam mengurangi permukiman kumuh serta mencapai target Kota Tanpa Kumuh. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, maka dapat memantau perkembangan kondisi permukiman kumuh dan memastikan bahwa program penataan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengambil judul **Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Pemukiman Kumuh di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana capaian *output* dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo?

2. Bagaimana capaian *outcomes* dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi *output* Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo.
2. Mengevaluasi *outcome* Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu kajian administrasi publik.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan dalam peningkatan serta perbaikan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk memberikan dasar yang kuat atas hasil pembelajaran selama perkuliahan. Materi yang disajikan dalam penelitian ini merupakan materi yang telah diajarkan selama perkuliahan dan

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini mampu untuk mengevaluasi program KOTAK.

1.5 Kerangka Teori/Konsep

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 5
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Proses Program KOTAKU			
1.	Kiswoyo, Nurcahyanto, dan Marom (2023) <i>Proses Collaborative Governance Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang</i>	Menganalisis proses <i>collaborative governance</i> dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.	Hasil penelitian ini menunjukkan proses <i>collaborative governance</i> dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang dianalisis dari aspek face to face dialogue (dialog tatap muka), trust buildings (membangun kepercayaan), dan commitment to process (komitmen untuk berproses) belum optimal, serta aspek shared understanding (berbagi pemahaman) dan intermediate outcomes (hasil sementara) sudah berjalan baik. Selain itu, juga ditemukan faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu faktor kepentingan pemerintah, struktur sosial, kultural/kebiasaan, dan bencana alam.
2.	Ulya (2018)	- Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Program	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang	KOTAKU di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat. - Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat	KOTAKU, yaitu: (1) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, wujud nyata dalam tahap ini dapat dibuktikan melalui masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi dan waktu dalam pelaksanaan program pada musyawarah atau rapat; (2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, wujud nyata dalam tahap ini dapat dibuktikan melalui sumbangan pemikiran, sumbangan materi dan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program KOTAKU; (3) partisipasi masyarakat dalam evaluasi, wujud nyata dalam tahap ini dibuktikan melalui masyarakat khususnya Tim Inti Perencana Partisipatif mengevaluasi dari hasil pembangunan serta mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program KOTAKU; (4) partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil, wujud nyata dalam tahap ini dapat dibuktikan dengan manfaat yang diambil setelah pelaksanaan program KOTAKU seperti berkurangnya debit air pada saat hujan. Setelah menganalisa data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa faktor pendukungnya adalah Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjadi

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
			salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program. Sedangkan faktor penghambat dalam partisipasi ini adalah masyarakat masih kurang sadar akan berpartisipasi dan kebiasaan masyarakat akan mengharapkan imbalan dalam melakukan serangkaian proses Program KOTAKU.
3.	Fitriana dan Sundaro (2022) Analisis Bentuk dan Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang	Untuk mengetahui bentuk dan tingkatan partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh di lokasi deliniasi kumuh di RW 02 dan RW 06 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.	Bentuk partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU adalah partisipasi tenaga yaitu 89%, kemudian bentuk partisipasi harta benda sebesar 88% dan bentuk partisipasi keterampilan dan keterampilan sebesar 87% serta bentuk partisipasi ide sebesar 86%. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di lokasi deliniasi masuk dalam kategori Citizen Power karena masing-masing hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kontinum 62,5%-100%, yaitu tingkatan <i>Citizen Control</i> dengan hasil perhitungan 93% berada di RW 02 (RT 01 dan RT 08), Selanjutnya untuk tingkatan <i>Delegated Power</i> diperoleh 80% - 87% berada di RW 02 (RT 02 dan RW 06), Sedangkan untuk tingkatan <i>Partnership</i> diperoleh 63% - 67% berada di RW 02 (RT 03 dan RW).

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Christianingrum dan Djumiarti/ 2019 / Implementasi program Kota Tanpa Kumuh di Semarang Timur	- Mengetahui implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di Kota Semarang Kecamatan Semarang Timur. - Mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan pendukung dari implementasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program KOTAKU masih mengalami beberapa hambatan seperti, Kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif pada saat proses pendataan kawasan lingkungan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait adanya program KOTAKU. Hal ini di dukung dengan kondisi masyarakat di kecamatan Semarang Timur rata – rata berada di bawah garis kemiskinan dengan mata pencaharian sebagian besar adalah buruh.
Pelaksanaan Program KOTAKU			
5.	Zethary dan Purnaweni / 2019 / Implementasi Program Kotaku Dalam Revitalisasi Daerah Kumuh Di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang	Menganalisis Implementasi Program Kotaku dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo sudah berjalan dengan baik namun belum ada konsistensi dalam menjalankan tahap keberlanjutannya. Direkomendasikan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dorongan untuk implementasi Program Kotaku yang lebih baik lagi, sehingga dapat terus mendukung pemberantasan daerah kumuh di Indonesia, khususnya di Kota Semarang.
6.	Rachma dan Widowati / 2020 / Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kota Tanpa Kumuh	Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu sudah sesuai dengan Surat Edaran DJCK Nomor 40

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	(KOTAKU) di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang	Tugu dan untuk mengetahui faktor pendorong maupun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.	Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh tersebut dibuktikan dengan telah terlaksananya program mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya kendala teknis ketika pelaksanaan program serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan sampah. Adapun saran dari peneliti yaitu meningkatkan pembangunan jalan yang sempit, meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, serta meningkatkan sistem persampahan yang baik di Kelurahan Mangunharjo
7.	Sitorus, Astuti dan Purnaweni / 2020 / Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang	Menganalisis bagaimana Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas sejauh ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahapan persiapan, perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya terkait penetapan area yang masuk delineasi kumuh, dan ada area yang masih menjadi

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
			sengketa dengan PT.KAI dan sebagian wilayah Kelurahan Tanjung Mas yang masuk dalam program Nasional Kampung Bahari, sehingga program Kotaku tidak bisa di implementasikan di daerah tersebut.
8.	Suharto / 2021 / Gambaran Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan)	Mengetahui gambaran pogram KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan).	Secara umum pelaksanaan kegiatan KOTAKU kota Seamarang dapat terlaksana cukup baik. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kelurahan berjalan cukup baik. Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik akan tetapi waktu pelaksanaannya mengalami keterlambatan dari master schedule yang telah ditentukan dengan kendala dan permasalahan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Manfaat Program KOTAKU			
9.	P Yustiani, Prasetyanti, dan S Rosidanti / 2021 / Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi di Kota Semarang	Menganalisis terkait praktik penataan permukiman kumuh melalui studi kasus di Kelurahan Randusari. Aspek utama yang dianalisis adalah bentuk integrasi, koordinasi, partisipasi, serta model penataan permukiman kumuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang mengkombinasikan teknik penelitian <i>literature review</i> dan data sekunder.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa program KOTAKU membantu pemerintah dalam mengatasi masalah permukiman kumuh dan kesejahteraan masyarakat setempat. Skema kampung tematik dan kampung pelangi yang diterapkan mempunyai tujuan yang saling berkaitan satu dan yang lainnya yaitu 4E (etos, ekosistem, edukasi dan ekonomi). Keberhasilan model kebijakan <i>top-down</i> bottom-up pada program ini terselenggara dengan keikutsertaan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi sehingga menciptakan inovasi berkelanjutan di lingkungan permukiman baik dalam kerjasama atau pendelegasian kekuasaan.
10.	Hanifanti / 2022 / Manfaat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Di Permukiman Sekitar Kawasan Kota Lama, Kota Semarang	- Menjelaskan peningkatan kualitas fisik permukiman melalui Program KOTAKU, - Menjelaskan manfaat Program KOTAKU terhadap kualitas hidup masyarakat di permukiman sekitar Kawasan Kota Lama.	Hasil dari penelitian ini menjelaskan manfaat yang diberikan oleh Program KOTAKU terhadap kualitas hidup masyarakat. Perbaikan melalui Program KOTAKU ini mampu meningkatkan kualitas fisik permukiman serta kualitas hidup masyarakat. Perbaikan yang paling memberikan manfaat pada kualitas hidup masyarakat adalah perbaikan kualitas jalan lingkungan dan perbaikan drainase lingkungan. Perbaikan kualitas jalan

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
			lingkungan memberikan manfaat pada aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat dimana mampu membuka kemudahan akses masyarakat sehingga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat. Sedangkan perbaikan drainase lingkungan memberikan manfaat berupa mengurangi intensitas banjir dan rob dimana memberikan perubahan besar bagi kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas fisik permukiman dan kualitas hidup masyarakat ini masih belum merata di permukiman tersebut, sehingga yang mengalami perubahan signifikan akibat adanya Program KOTAKU hanya Kelurahan Rejomulyo.
11.	Sahara, Subowo, dan Herawati / 2023 / Peran <i>stakeholders</i> Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di kelurahan Dadapsari Kota Semarang	Menganalisis peran pemangku kepentingan Program KOTAKU dan kendala yang dihadapi dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Dadapsari, Kota Semarang.	Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Program KOTAKU bermanfaat untuk mengurangi permukiman kumuh dan perlu dilanjutkan dengan program penanganan kawasan permukiman kumuh lain yang sejenis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang relevan tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu membahas tentang program KOTAKU dengan tujuan untuk mengurangi permukiman kumuh. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan program KOTAKU. Sementara itu, perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti terdahulu yaitu konsep atau teori yang digunakan, lokus atau tempat yang dilakukan penelitian serta tahun dalam pelaksanaan penelitian.

1.5.2. Administrasi Publik

1.5.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “to serve” yang dapat didefinisikan sebagai melayani atau memenuhi (dalam Anggara, 2016:13). Administrasi adalah upaya menyeluruh terhadap semua operasi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Publik terdiri dari individu yang identik dalam cara mereka berpikir, berperasaan, berharap, bersikap, dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku (Pasolong, 2014 :6).

Menurut Nigro dan Nigro (dalam Anggara, 2016:46), administrasi publik merupakan bentuk dari upaya yang dilakukan secara bersama-sama dalam lingkungan kerja publik yang tersusun atas tiga cabang, yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif.

Menurut Yeremias T Keban (2014:4), menjelaskan awal mula dari istilah administrasi publik merujuk pada peranan pemerintah yang merupakan yang diberikan sebuah kekuasaan dan harus memunculkan berbagai jenis terobosan langkah guna kepentingan masyarakat bersama. Masyarakat yang merupakan sekelompok orang yang harus tunduk dan patuh serta menjalankan segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Keban, 2014: 4). Menurut Dimock, Dimock, & Fox (dalam Keban, 2014: 5) mengartikan administrasi publik merupakan sebuah kegiatan pemroduksian barang atau jasa guna mencukupi segala kebutuhan konsumen.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3), administrasi publik merupakan upaya dalam pengelolaan sumber daya yang terstruktur dan berdasarkan koordinasi yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Bentuk dari koordinasinya sendiri tersusun atas formulasi, implementasi, dan pengelolaan (manage) atas segala kebijakan yang ditujukan untuk publik. Penulis tersebut sama-sama memaparkan administrasi publik yang menjadi sebuah seni dan ilmu (art and science) yang berguna dalam hal pengaturan segala jenis kebijakan publik dan menjalankan tugas yang telah diembankan. Administrasi publik memiliki tujuan untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan guna menyempurnakan organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014), administrasi publik merupakan perpaduan yang kompleks antara teori dan praktik yang tujuannya adalah untuk mengiklankan suatu pengertian terhadap pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang melaksanakan perintah. Administrasi publik juga

meningkatkan respon kebijakan publik dengan tujuan pemenuhan kebutuhan sosial. Pemaparan inilah yang kemudian menjadikan administrasi merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai efektifitas dan efisiensi di dalamnya. Perihal inilah yang dijalankan guna menerapkan praktik manajemen kebutuhan publik yang lebih optimal lagi.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Dalam hubungan dengan perkembangan ilmu administrasi publik, anomalies ini pernah terjadi beberapa kali, dan terlihat pada pergantian cara pandang yang lama dengan yang baru, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nicholas Henry (1995:2149). Nicholas Henry mengungkapkan bahwa standar suatu disiplin ilmu, seperti yang diungkapkan oleh Robert T. Golembiewski, bahwa suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus. Fokus memuat metode dasar yang digunakan untuk memecahkan persoalan. Sedangkan lokus membuat tempat dimana mode tersebut digunakan atau diterapkan.

Paradigma pertama (1900-1926) disebut sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Tokoh paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White Goodnow. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Implikasi dari paradigma pertama ini bahwa administrasi harus dilihat dari suatu yang bebas nilai. Namun, paradigma ini hanya ditekankan pada aspek lokus saja yaitu birokrasi pemerintah, akan tetapi fokus administrasi publik kurang dibahas.

Paradigma kedua (1927–1937) dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Dengan tokoh terkenal yaitu Willoughby, Gullick dan Urwick yang sangat dipengaruhi oleh tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka mengenalkan prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik, yang dituangkan dalam POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja. Sedangkan dari administrasi publik tidak diungkap secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk organisasi pemerintah.

Paradigma ketiga (1950–1970) adalah paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik yang dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

Paradigma keempat (1956-1970), merupakan paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Pada paradigma keempat ini, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya terus dikembangkan secara ilmiah dan lebih mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan lain sebagainya menjadi fokus pada paradigma ini.

Paradigma kelima (1970-sekarang), merupakan paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Pada paradigma ini telah memiliki *focus* dan *locus* yang jelas. Fokusnya yaitu terdiri dari teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya terdiri dari masalah masalah dan kepentingan-kepentingan publik

Paradigma keenam (1990-sekarang), paradigma ini disebut sebagai paradigma *Governance*. Paradigma ini merupakan paradigma terbaru dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Paradigma ini merupakan paradigma tambahan yang dikemukakan oleh George Frederickson disamping 5 paradigma yang telah dikemukakan oleh Nicholas Henry. Paradigma ini memiliki fokus yang meliputi usaha mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain atau membuat organisasi dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan dari sistem desentralisasi dan juga organisasi yang demokratis serta responsif pun partisipatif.

Paradigma ini mengutamakan proses dan mekanisme yakni para masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan yang muncul, dan menjalankan hak serta kewajibannya. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat berperan dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum secara kondusif, sedangkan sektor swasta diharapkan berperan dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sementara itu masyarakat dapat berperan dalam menyelenggarakan interaksi sosial politik secara sehat.

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma keenam atau paradigma governance. Paradigma ini membahas tentang bagaimana pemerintah memiliki tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dengan tujuan mencapai kepuasan masyarakat itu sendiri. Pada paradigma governance pemerintah berusaha untuk merespons terkait fenomena-fenomena sosial yang terjadinya seperti terjadinya globalisasi maupun permasalahan sosial yang terjadi. Program KOTAKU merupakan program yang dapat mengatasi permasalahan pemukiman kumuh yang ada di Kota Semarang tanpa menggusur pemukiman warga.

1.5.3. Model Evaluasi Sistem Analisis

Menurut Diana (2022) Kard Ludwig von Bertalanffy seorang biology Jerman pada tahun 1951 memelopori model evaluasi sistem analisis yang sering dikenal sebagai Management evaluation. Dalam manajemen sistem digambarkan dalam bentuk linier proses produksi yang terdiri dari masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), akibat (*outcome*), dan pengaruh (*impact*). Bentuk linier tersebut menjadi parameter dan dasar penilaian pelaksanaan kegiatan. Teori ini menyatakan bahwa sebuah program adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen struktural dan fungsional yang saling terkait dan terdiri dari sub-subsistem yang harus bekerja secara harmonis. Dari model linier tersebut maka setiap bagian perlu dievaluasi untuk menentukan nilai dan manfaat keseluruhan sistem. Model evaluasi sistem analisis dapat dilakukan evaluasi secara terpisah pada setiap jenis evaluasi (Wirawan,2016). Model

evaluasi ini memiliki 5 (lima) jenis evaluasi, yaitu evaluasi masukan (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi keluaran (*output evaluation*), evaluasi akibat (*outcome evaluation*) dan evaluasi pengaruh (*impact evaluation*) dengan penejelasan sebagai berikut:

1. Evaluasi masukan (*input evaluation*).

Mengevaluasi masukan rencana program terdahulu untuk dijadikan program yang akan dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis dan menilai kecukupan kuantitas dan kualitas masukan yang diperlukan untuk melaksanakan program.

2. Evaluasi proses (*process evaluation*).

Evaluasi proses memfokuskan pada pelaksanaan program dan menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki.

3. Evaluasi keluaran (*output evaluation*).

Evaluasi keluaran mengukur dan menilai keluaran daripada program, yaitu produk yang dihasilkan program. Berapa banyak dan berapa baik produk dari program.

4. Evaluasi akibat (*outcome evaluation*).

Evaluasi akibat mengukur apakah masyarakat yang mendapatkan layanan program mengalami perubahan

5. Evaluasi pengaruh (*impact evaluation*)

Evaluasi yang menilai perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dan para pemangku kepentingan sebagai akibat dari intervensi program dalam jangka panjang

Pemilihan terhadap model evaluasi sistem analisis didasarkan oleh peneliti dapat mengevaluasi bagian keluaran (output) dan akibat (outcome) saja. Dengan kata lain penulis yang merupakan evaluator dapat memilih jenis evaluasi sesuai kebutuhan penelitian.

Evaluasi output digunakan untuk mengidentifikasi dampak langsung yang dialami oleh kelompok sasaran akibat pelaksanaan berbagai kegiatan, aktivitas, distribusi hibah, subsidi, dan tindakan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka implementasi suatu kebijakan (Hariani, 2017).

Menurut Purwanto, dkk (dalam Hariani, 2017) terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menilai kualitas output dari suatu kebijakan yang menekankan pada pencapaian tujuan dari usaha/kinerja yang telah dilakukan dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Akses

Aspek dalam akses digunakan untuk menentukan tingkat keterjangkauan program oleh kelompok sasarannya. Akses dalam konteks ini merujuk pada kemudahan yang diberikan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran untuk berinteraksi dengan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Akses juga berarti memberikan peluang yang sama kepada semua anggota kelompok sasaran, sehingga mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mengalami manfaat dari program yang dijalankan, tanpa memandang perbedaan gender, etnisitas, agama, atau afiliasi politik. Dengan kata lain, akses

mengindikasikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kelompok sasaran dalam hal memanfaatkan program yang ada.

2. Cakupan

Cakupan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kelompok sasaran tertentu telah terjangkau oleh pelaksanaan program. Terdapat dua langkah dalam prosedur pengukuran cakupan, antara lain: mengidentifikasi siapa yang menjadi kelompok sasaran, dan membandingkan jumlah anggota kelompok sasaran yang telah menerima layanan dengan jumlah total anggota kelompok yang menjadi target.

3. Frekuensi

Frekuensi digunakan untuk mengukur sejauh mana kelompok sasaran menerima pelayanan dari program. Frekuensi yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah frekuensi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pelaksana dan penanggungjawab.

4. Bias

Bias digunakan untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan atau program tersebut cenderung menyasar kelompok masyarakat yang bukan bagian dari sasaran yang seharusnya. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa pelaksana tidak memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk menerima bantuan yang disediakan. Pemerintah memberikan pelayanan melalui kebijakan atau program dengan fokus kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Ketepatan layanan

Ketepatan layanan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu kebijakan atau program dilakukan dengan akurat atau tidak. Jika terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan program apakah akan berpotensi menyebabkan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengevaluasi sejauh mana para pelaksana program ini menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab. Dalam menjalankan tugas mereka, para pelaksana harus selalu mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada kelompok sasaran, tanpa mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh kelompok sasaran. Jika terjadi pengurangan hak-hak kelompok sasaran, maka hal tersebut harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Kesesuaian program dengan kebutuhan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh kelompok sasaran. Selain itu, aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kebijakan atau program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Evaluasi outcome digunakan untuk mengevaluasi hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan. Evaluasi ini mencakup berbagai perubahan yang muncul sebagai akibat dari implementasi kebijakan atau program tersebut, dan bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja implementasi kebijakan atau program telah berhasil (Hariani, 2017).

Menurut Purwanto, dkk (2015: 107) terdapat beberapa tahap dalam penilaian policy outcome, yaitu *initial outcomes*, *intermediate outcomes*, dan *longterm outcomes*. Peneliti menggunakan tahap *short outcomes* karena program KOTAKU di Kota Semarang selesai pada bulan Juni 2023.

Initial Outcomes/Short Outcomes

Outcomes policy dapat dinilai dari akibat langsung yang ditimbulkan dari suatu program/kebijakan dalam jangka waktu pendek yaitu 1-3 tahun. Tahap ini meliputi :

a. *Knowledge* (Pengetahuan),

Pengetahuan dalam evaluasi output memiliki arti segala sesuatu yang diketahui atau informasi baru yang diterima oleh kelompok sasaran selama program berlangsung.

b. *Attitudes* (sikap)

Sikap dalam evaluasi output memiliki arti perilaku yang tercipta oleh kelompok sasaran setelah menerima program.

c. *Skill* (Keterampilan)

Keterampilan dalam evaluasi output memiliki arti keterampilan yang dimiliki oleh kelompok sasaran setelah menerima bantuan program

d. *Aspirations* (Aspirasi)

Aspirasi dalam evaluasi output memiliki arti pendapat atau pemikiran oleh kelompok sasaran pada saat program berlangsung (University of Wisconsin, 2015 dalam Diana, 2022).

1.5.4. Program Kotaku

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program nasional yang berfungsi sebagai "platform" untuk menangani masalah kumuh dengan menggabungkan berbagai sumber daya. Sumber dana dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten, donor, perusahaan swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh yang diawasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi, dan mendorong partisipasi masyarakat. KOTAKU dimaksudkan untuk berfungsi sebagai "platform kolaborasi" yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota dan masyarakat, dan pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Selain itu, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, yaitu *Sustainable Development Goal's* (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) yang bertujuan untuk menguatkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global (Perwal No. 19 Tahun 2023).

Didasarkan pada pemahaman ini, berikut adalah beberapa karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

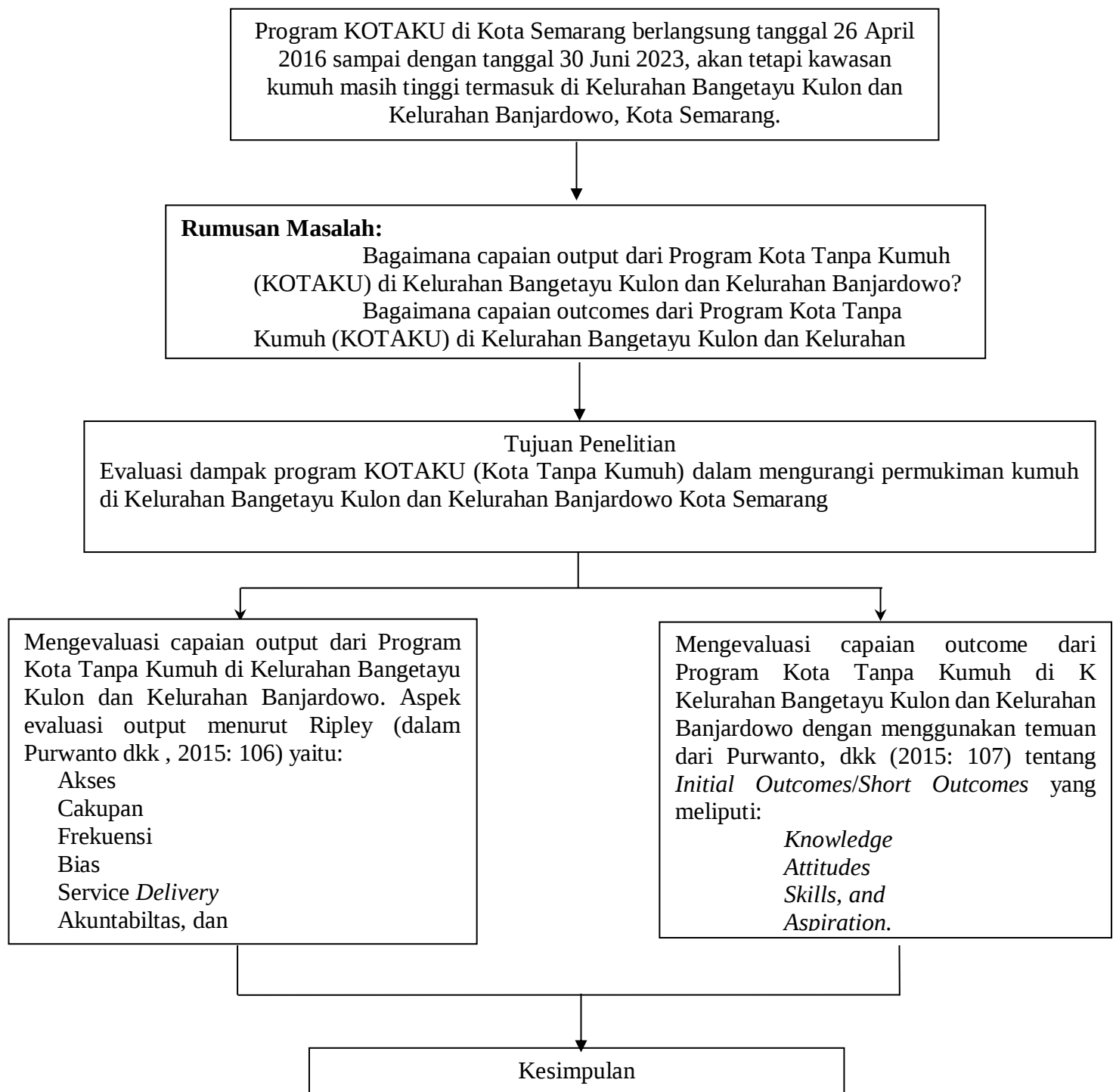
1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman.
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi.
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan Lingkungan;
 - b. Drainase Lingkungan,
 - c. Penyediaan Air Bersih/Minum;
 - d. Pengelolaan Persampahan;
 - e. Pengelolaan Air Limbah;
 - f. Pengamanan Kebakaran; dan
 - g. Ruang Terbuka Publik.

Untuk mengidentifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, karakteristik fisik digunakan sebagai dasar untuk menentukan kriteria dan indikator gejala kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non-fisik juga perlu diidentifikasi untuk melengkapi penyebab kumuh, seperti perilaku masyarakat, kepastian untuk bermukim, dan kepastian untuk berusaha.

1.5.5. Pemukiman Kumuh

Permukiman adalah wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek aspek sosial, ekonomi, budaya dan para

penghuninya. Tidak hanya menyangkut kuantitas melainkan juga kualitas. Tidak hanya menyangkut tempat hunian rumah, tetapi juga tempat kerja, berbelanja dan bersantai (Eko Budiharjo dalam Alfian 2014). Permukiman kumuh adalah suatu permukiman yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat mencapai kehidupan layak bagi penghuninya. Kumuh mencakup berbagai permasalahan-permasalahan seperti permukiman yang illegal, ketidaktersediaan pelayanan infrastruktur dasar sehingga tidak menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat. (Wicaksono dalam Nurokhman 2019). Keberadaan permukiman kumuh seringkali diidentikkan sebagai suatu kawasan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, kepadatan kawasan permukiman padat, kondisi kurang layak, penghuninya merupakan kelas menengah kebawah, berbahaya, tidak aman, kondisi lingkungannya tidak sehat, kotor dan stigma-stigma negative lainnya. Dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh memiliki permukiman yang padat, kualitas konstruksi yang rendah, ketersediaan sarana dan prasarana yang rendah, dan bentuk kemiskinan lainnya. Kondisi fisik permukiman terdiri dari hal-hal seperti transportasi, sarana, prasarana, rumah, dan jalan, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya.



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Evaluasi Output

Evaluasi output adalah mengidentifikasi dampak langsung program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Genuk akibat dari pelaksanaan berbagai kegiatan, aktivitas, subsidi, dan tindakan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi luas kumuh. Evaluasi output memiliki sub fenomena yaitu:

1. Akses

Aspek dalam akses digunakan untuk menentukan tingkat keterjangkauan program KOTAKU oleh masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo. Akses merujuk pada kemudahan yang diberikan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran untuk berinteraksi dengan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Akses juga berarti memberikan peluang yang sama kepada semua anggota di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo, sehingga mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mendapat manfaat dari program yang dijalankan tanpa memandang perbedaan gender, etnisitas, agama, atau afiliasi politik. Dengan kata lain, akses mengindikasikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk dalam hal memanfaatkan program yang ada.

2. Cakupan

Cakupan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo telah terjangkau oleh pelaksanaan program KOTAKU. Terdapat dua langkah dalam prosedur pengukuran cakupan, antara lain: mengidentifikasi siapa yang menjadi kelompok sasaran, dan membandingkan jumlah anggota kelompok sasaran yang telah menerima layanan dengan jumlah total anggota kelompok yang menjadi target.

3. Frekuensi

Frekuensi digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo menerima pelayanan dari program KOTAKU. Frekuensi yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah frekuensi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah, Fasilitator dan BKM di masing - masing Kelurahan. Frekuensi pendampingan program KOTAKU dilaksanakan selama program KOTAKU berlangsung.

4. Bias

Bias digunakan untuk mengevaluasi apakah program KOTAKU yang diberikan oleh pelaksana program tersebut sesuai dengan sasaran yang seharusnya, yaitu masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa pelaksana tidak memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk menerima bantuan yang disediakan. Pemerintah memberikan pelayanan

melalui kebijakan atau program dengan fokus kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Ketepatan layanan

Ketepatan layanan untuk menilai apakah pelaksanaan program KOTAKU dilakukan dengan akurat atau tidak. Jika terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan program KOTAKU apakah akan berpotensi menyebabkan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan program KOTAKU yang telah ditetapkan.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengevaluasi sejauh mana para pelaksana program KOTAKU dalam menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab. Dalam menjalankan tugas, para pelaksana harus selalu mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada kelompok sasaran, tanpa mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh kelompok sasaran. Jika terjadi pengurangan hak-hak kelompok sasaran, maka hal tersebut harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Kesesuaian program KOTAKU dengan kebutuhan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana program KOTAKU yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo. Selain itu, aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kebijakan atau program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.6.2 Evaluasi *Outcome*

Evaluasi outcome digunakan untuk mengevaluasi hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan. Evaluasi ini mencakup berbagai perubahan yang muncul sebagai akibat dari implementasi kebijakan atau program tersebut, dan bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja implementasi kebijakan atau program telah berhasil.

a. *Knowledge* (Pengetahuan),

Pengetahuan dalam evaluasi output memiliki arti segala sesuatu yang diketahui atau informasi baru yang diterima oleh masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo selama program berlangsung.

b. *Attitudes* (sikap)

Sikap dalam evaluasi output memiliki arti perilaku yang tercipta oleh masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo setelah menerima program.

c. *Skill* (Keterampilan)

Keterampilan dalam evaluasi output memiliki arti keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo setelah menerima bantuan program.

d. *Aspirations* (Aspirasi)

Aspirasi dalam evaluasi output memiliki arti pendapat atau pemikiran oleh masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo pada saat program berlangsung (University of Wisconsin, 2015 dalam Diana, 2022).

Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep

Rumusan Masalah	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati
Bagaimana capaian output dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Genuk	Evaluasi output	Akses	1. Mudah dijangkau oleh kelompok sasaran 2. Kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran
		Cakupan	3. Menentukan kelompok sasaran yang menjadi target untuk mendapatkan program 4. Membandingkan jumlah masyarakat yang menerima bantuan dengan jumlah masyarakat yang menjadi target
		Frekuensi	5. Intensitas masyarakat dalam menerima pelayanan dari program
		Bias	6. Menilai penyaluran program selama program berlangsung
		Ketepatan layanan	7. Ketepatan pelayanan terhadap program dalam hal waktu pelaksanaan dan

			pemanfaatan program
		Akuntabilitas	8. Pertanggungjawaban oleh pihak-pihak terkait setelah menerima program
		Kesesuaian program dengan yang dibutuhkan	9. Kesesuaian antara program yang telah terlaksana dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
Bagaimana capaian outcome dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Genuk	Evaluasi outcome	Pengetahuan	10. Wawasan baru yang didapatkan pada saat menerima bantuan program
		Sikap	11. Sikap masyarakat setelah menerima bantuan program
		Keterampilan	12. Keterampilan masyarakat yang didapatkan setelah menerima program berlangsung
		Aspirasi	13. Pola pikir masyarakat setelah mendapatkan bantuan program

Sumber : Hariani, 2017

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan website di Kecamatan Genuk, Kecamatan Genuk merupakan salah satu kecamatan dari 16 (enam belas) Kecamatan di Kota Semarang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Keadaan Topografis wilayah Kecamatan Genuk merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 0 - 2,5 m, dengan curah hujan + 2000-3000 mm/tahun dan suhu udara rata-rata + 29 – 360 c, dengan kondisi alam di beberapa wilayah kelurahan (Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo, Muktiharjo Lor, Gebangsari dan Genuksari bagian utara).

Secara demografis tercatat pada Monografi Kecamatan Genuk bahwa jumlah penduduk akhir Bulan Desember 2021 adalah 121.714 orang sedangkan akhir Bulan Juni 2022 bertumbuh menjadi 122.505 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kecamatan Genuk sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan salah satu beban ketergantungan akan tinggi. Tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan semakin tinggi pula jumlah penduduk usia muda yang belum produktif, akan menjadi beban bagi penduduk usia produktif. Kecamatan Genuk merupakan kawasan industri sehingga pertumbuhan penduduk di Kecamatan Genuk peningkatannya sangat pesat, dan hal itu mengundang konsekuensi untuk penyediaan sarana prasarana kegiatan dan aktifitas warga masyarakat yang meliputi sarana peribadatan, sarana infrastruktur dan sarana sosial kemasyarakatan (Sari, 2023).

Mengatasi pemukiman kumuh di Kota Semarang melalui program KOTAKU yang berlangsung pada tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 Penanganan permukiman kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target

nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Selain itu, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, yaitu *Sustainable Development Goal's* (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) yang bertujuan untuk menguatkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global (Perwal No. 19 Tahun 2023).

Berdasarkan hal tersebut hingga saat ini program KOTAKU yang terlaksana di Kota Semarang masih terdapat wilayah yang masih memiliki luas kumuh yang tinggi di Kecamatan Genuk. Pada penelitian ini, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kecamatan Genuk Kota Semarang diantaranya adalah masih tingginya luas kumuh di Kecamatan Genuk sedangkan program KOTAKU telah berakhir pada Juni 2023 serta tidak meratanya pelaksanaan program di wilayah Kota Semarang khususnya di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo. Permasalahan tersebut menarik perhatian peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis menggunakan teori evaluasi *output* dan *outcome*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasan penelitian, dan untuk metode penelitian peneliti menggunakan metode deskriptif. Menurut Moleong (2010:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis sesuatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari permasalahan yang terdapat pada masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, pandang, dan pengaruh dari suatu fenomena.

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan secara mendalam mengenai evaluasi dampak program KOTAKU dalam menanggulangi persoalan pemukiman kumuh di Kecamatan Genuk. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata - kata yang dipaparkan seperti yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus.

1.8.2 Situs Penelitian

Peneliti menetapkan penelitian Kawasan kumuh tertinggi dan terendah di Kelurahan yang berada di Kecamatan Genuk. Kawasan kumuh yang paling tinggi diantara kelurahan yang lainnya terdapat Kelurahan Banjardowo dengan luas 32,78 (Ha), jumlah penduduk yang dimiliki sebanyak 2.634 jiwa, dan nilai kekumuhan sebesar 337 (kategori ringan). Selain itu juga terdapat Kelurahan Kawasan kumuh yang terendah di Kecamatan Genuk yaitu Kelurahan Bangetayu Kulon dengan luas 1,5 (Ha), jumlah penduduk yang dimiliki sebanyak 324 jiwa, dan nilai kekumuhan sebesar 14 (kategori ringan)

Berdasarkan penetapan tersebut, Kelurahan Banjardowo dan Kelurahan Bangetayu Kulon yang akan menjadi lokus pada penelitian ini. Peneliti mengambil sampel 2 (dua) Kelurahan yaitu yang memiliki luas kumuh tertinggi dan terendah di Kecamatan Genuk untuk menjadi pembanding pelaksanaan program KOTAKU di Kecamatan Genuk.

1.8.3 Subjek Penelitian

Moleong (2010) mendeskripsikan Subjek Penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2010). Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan

data lebih lengkap (Sugiyono, 2010: hal 301). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. 8
Narasumber

No	Narasumber	Alasan
1.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang	Bappeda (kekuatan) memiliki cukup besar power terhadap pelaksanaan Program KOTAKU karena perannya sebagai leading sector yang mengoordinasikan stakeholders lain dalam melaksanakan tugasnya masing masing dan lebih memahami informasi terkait program.
2.	BKM	Peran aktif BKM sangat diperlukan untuk berjalannya pelaksanaan membantu program KOTAKU
3.	Fasilitator Kotaku di Kecamatan Genuk	Diperlukannya informasi mengenai program KOTAKU untuk keberlangsungan program selama ini
4.	Masyarakat yang merasakan dampak dari program KOTAKU atau Tokoh masyarakat yang sangat mengerti Program KOTAKU	Selain dari para implementor yang perlu dijadikan narasumber, masyarakat pun turut dilibatkan sebagai yang menerima bantuan dari program kotaku.

1.8.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2010), jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa kualitatif. Dalam penelitian kualitatif jenis data yang digunakan peneliti adalah data yang berupa rangkaian kata atau frase yang dapat menggambarkan peristiwa atau fenomena yang ditemukan dalam penelitian bukan berupa angka-angka.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain. Data-data yang

dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber. Adapun data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer disebut juga data tangan pertama merupakan data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki. Data primer dalam penelitian ini peneliti peroleh dari observasi yang bersifat langsung ataupun melalui wawancara dengan obyek yang bersangkutan yang tertera pada tabel 1.8

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data sekunder bisa berupa dokumentasi atau berupa catatan yang diperoleh. Seperti data tertulis yang berupa sumber dari buku, sumber data dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sedangkan sumber data tambahan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, terdiri dari dokumen yang meliputi daftar penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dan jurnal.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung, atau melalui tatap muka antara peneliti dengan narasumber. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara hendaknya membuat beberapa daftar pertanyaan yang bisa dijadikan pedoman ketika melakukan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2011: 233). wawancara

yang dilakukan oleh peneliti dan responden dalam penelitian ini dilakukan di ruangan yang telah ditentukan dan pada jam sesuai dengan perjanjian antara peneliti dengan narasumber.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan dokumentasi berupa foto atau gambar, peraturan – peraturan dan dokumen terkait.

1.8.7 Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biken (1982), analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan meneliti data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis. Analisa data adalah proses penelaahan atau pengujian secara menyeluruh suatu objek dalam upaya untuk mengetahui bagian-bagiannya, hubungannya, dan hubungannya satu sama lain. sebagian dari keseluruhan. Dalam penelitian, tahapan harus dibuat untuk memastikan bahwa peneliti berada di jalur yang benar dan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat komponen menurut Miles dan Huberman (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada informan. Peneliti melakukan wawancara terhadap para informan dengan datang ke dinas terkait dan juga para masyarakat yang tinggal di Kota Semarang. Peneliti mewawancarai para informan tidak hanya dalam satu kesempatan. Pengambilan data melalui observasi dan dokumentasi juga dilakukan beberapa kali dengan mendatangi lokus penelitian ini.

2. Reduksi Data

Pada langkah ini, peneliti memilih data yang relevan dan tidak relevan dengan tujuan dan masalah penelitian. Kemudian, data diringkaskan, diberi kode, dan kemudian dikelompokkan (di organisir) sesuai dengan tema-tema yang relevan. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan (Arifin, 2012:72). Dalam proses reduksi data ini, peneliti melakukan pemilihan atau mengkodekan wawancara untuk kemudian kutipan wawancara tersebut digunakan untuk menguatkan hasil pembahasan dan analisis.

3. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi terhadap data yang dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam hal ini, bentuk penyajian data yang dipilih adalah teks naratif. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua informasi yang muncul selalu berhubungan dengan data lainnya. Akibatnya, diharapkan setiap data dapat dipahami terlepas dari latar belakangnya. Penyajian data ini digunakan untuk menafsirkan dan mengambil kesimpulan, atau dalam

penelitian kualitatif disebut inferensi, yang mendefinisikan makna data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir dalam analisis data ini. Hasilnya adalah pemaknaan data yang dikumpulkan dan verifikasi yang dilakukan untuk membuat data lebih tepat dan objektif. Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap data–data hasil penafsiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maka analisa data dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai.

1.8.8 Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang dimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Strategi triangulasi yang ditinjau sebelumnya dapat membantu menetapkan validitas (Leavy, 2017). Menurut Sutopo (2006) menjelaskan empat jenis teknik triangulasi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, diantaranya yaitu (1) triangulasi sumber/data (2) triangulasi peneliti (3) triangulasi metode (4) triangulasi teoritis.

Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik sumber karena untuk menggali kebenaran informasi dari dampak adanya program KOTAKU harus membandingkan melalui sudut pandang dari berbagai informan. Dari perbedaan pandangan akan menghasilkan pengetahuan untuk suatu kebenaran.

Tahapan melakukan teknik sumber yaitu:

- 1) Peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber;
- 2) Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan;
- 3) Peneliti melakukan kroscek terhadap pendapat narasumber yang satu dengan lainnya menggunakan pertanyaan yang sama.